



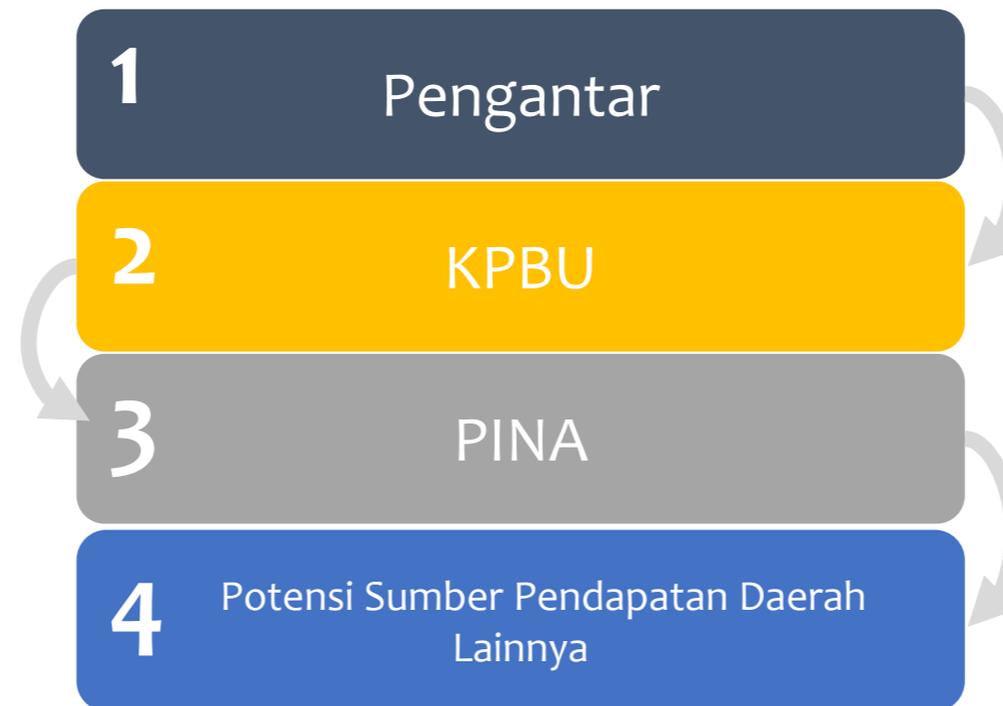
MODEL-MODEL PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kedeputan Bidang Pengembangan Regional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Yogyakarta, 12 Mei 2017



OUTLINE PEMBAHASAN



Pengantar

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan **Money Follow Program**.
2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan **Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial** dengan memperhatikan pada:
 - Pengendalian perencanaan
 - Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018
 - Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
 - Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL (1/2)

- ❑ Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.
- ❑ Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).
- ❑ Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

Penajaman Prioritas Nasional

URAIAN	RKP 2017	RANCANGAN RKP 2018
Prioritas Nasional	23	10
Program Prioritas	88	30

- Prioritas yang semakin tajam menjadi dasar dari upaya penajaman alokasi anggaran pembangunan
- Disamping itu disusun pula skala prioritas dari masing-masing program prioritas yang akan digunakan jika terdapat kenaikan/penurunan anggaran

Perkuatan Implementasi *Money Follow Program*

**RKP
2018**



Menajamkan Prioritas Nasional



10 PN dan 30 Program Prioritas



Memastikan pelaksanaan program



Pengendalian dilakukan sampai ke level proyek (satuan 3)



Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan



Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta

Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018

Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Melanjutkan implementasi *Money Follow Program*

1. Integrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan (*Belanja K/L – Subsidi/PSO – Dana Transfer Khusus – Dana Desa – PMN BUMN – KPBU - PINA*)
2. Menyusun proyek prioritas nasional (“satuan 3”)
3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran

Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah

1. Mengintegrasikan proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan
2. Memastikan kesiapan proyek prioritas nasional
3. Memastikan penganggaran proyek prioritas nasional
4. Meningkatkan koordinasi KemKeu - Bappenas (belanja operasional – belanja prioritas)

Memperkuat kendali program

1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu
2. Menyempurnakan format RKP-RKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program
3. Melaksanakan data *sharing* (*Bappenas-KemKeu-Menko*) untuk pengendalian dan monev
4. Bappenas melakukan pengendalian sumber pendanaan

Sumber-Sumber Pembiayaan

Lingkup Pemerintah Pusat

1 APBN

SISI SUMBER PENERIMAAN

- Rupiah Murni (RM)
- Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

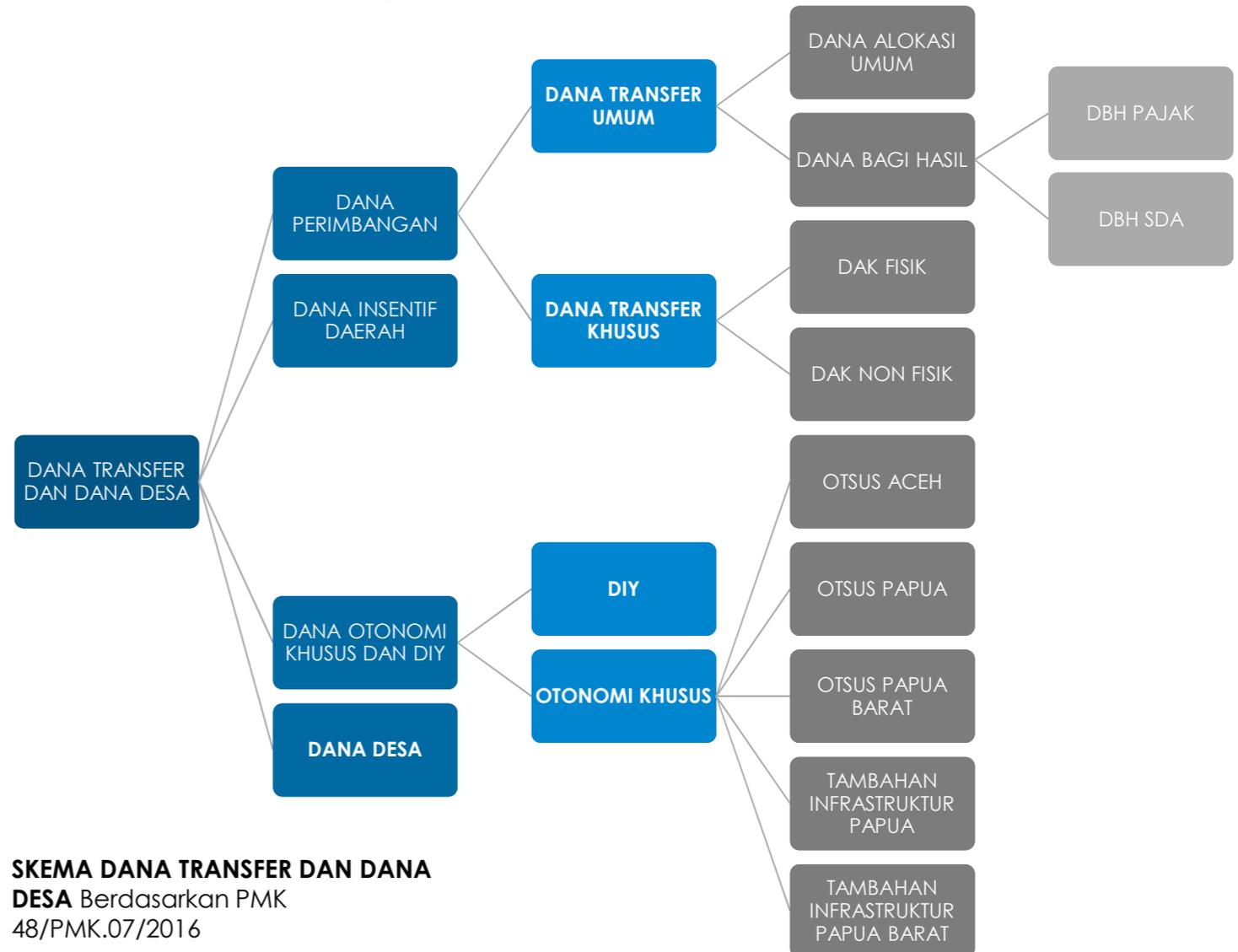
SISI BELANJA

- Dekonsentrasi
- Tugas Pembantuan
- Hibah
- Urusan Bersama

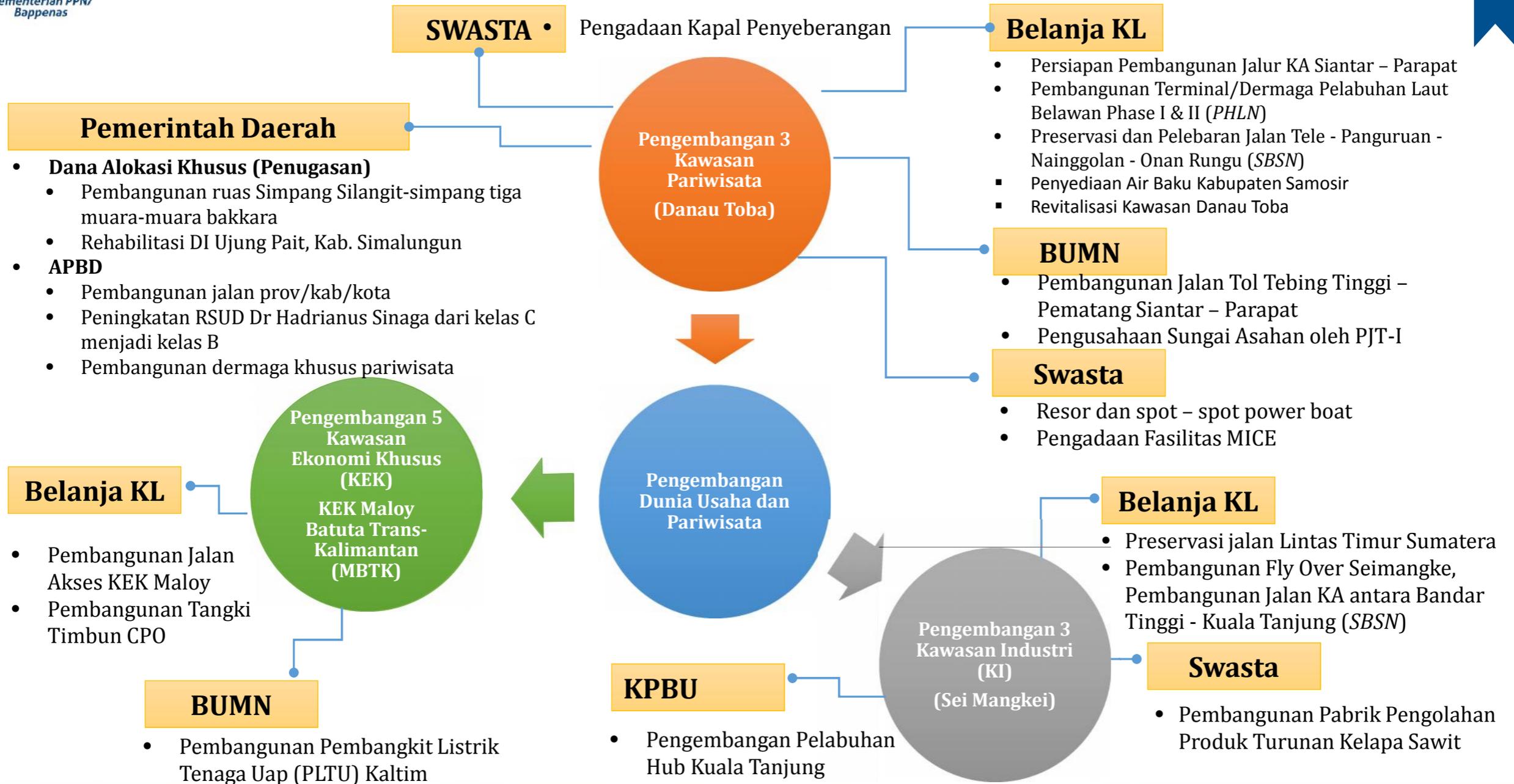
2 Swasta

- Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA)

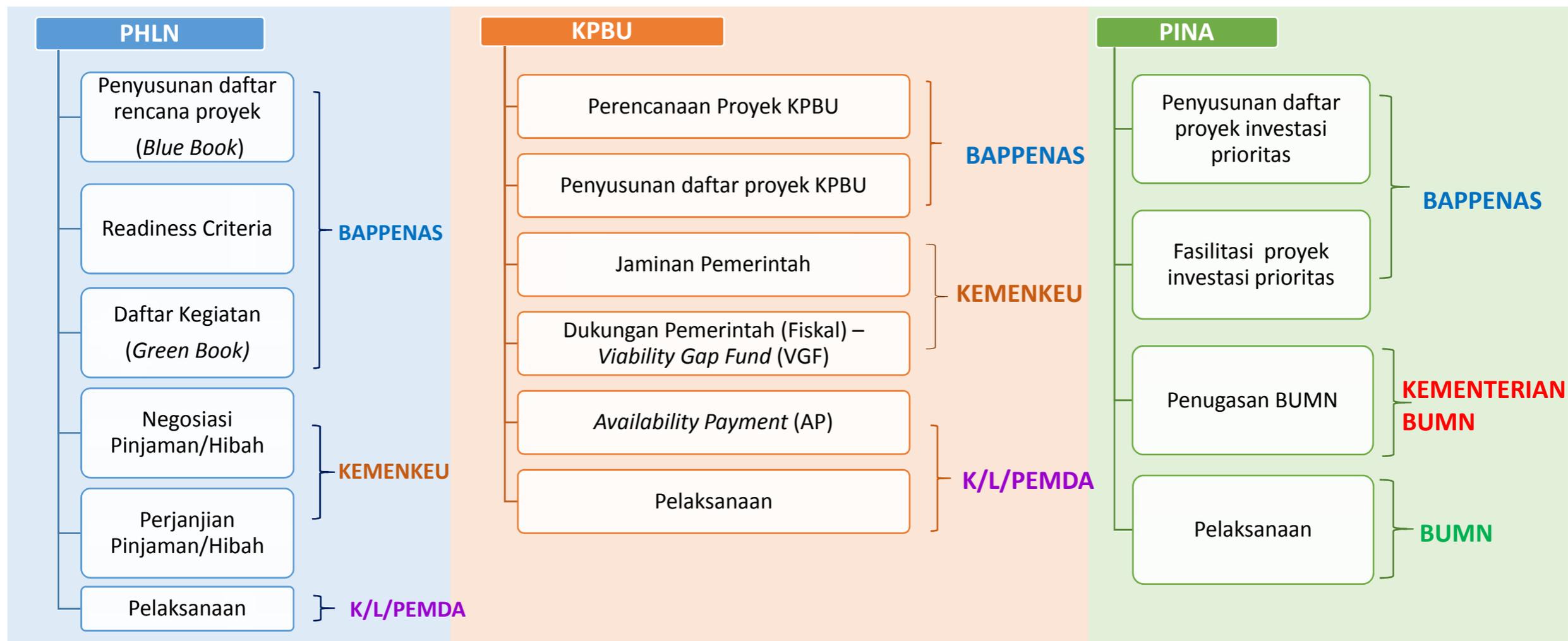
Lingkup Pemerintah Daerah



Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan (Ilustrasi)



ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN : PHLN, KPBU dan PINA



☐ Menteri PPN/Kepala Bappenas berperan sebagai Koordinator PINA

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)

REGULASI KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Aspek	Pengaturan	
Subyek Kerjasama	<u>Pemerintah</u> 1. Menteri 2. Kepala Lembaga 3. Kepala Daerah 4. BUMN/BUMD	<u>Badan Usaha</u> 1. BUMN/BUMD 2. Badan Usaha Asing 3. Perseroan Terbatas 4. Koperasi
Obyek Kerjasama	Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial (19 Jenis Infrastruktur)	
Kontribusi Pemerintah	1. Pembiayaan Sebagian KPBU 2. Dukungan pemerintah 3. Jaminan pemerintah	
Pengembalian investasi Badan Usaha	1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (<i>User Charge</i>). 2. Pembayaran ketersediaan layanan (<i>Availability Payment</i>). 3. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan.	
Tahapan	1. Tahap Perencanaan 2. Tahap Penyiapan 3. Tahap Transaksi	



SUBJEK DALAM KPBU

Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah

PJPK

(Penanggung
Jawab Proyek
Kerjasama)

Mendelegasikan Kewenangan dlm Ruang Lingkup, Tugas & Tanggung Jawab sesuai peraturan perundangannya, **misalnya: BPJT utk Jalan Tol**

BUMN/D berdasarkan Peraturan Perundangan sektor, **misalnya: PT. PLN/ PDAM**

PJPK Gabungan utk 2 (dua)/lebih jenis infrastruktur. **misalnya: Jembatan dan Pembangkit listrik**

NOTA KESEPAHAMAN:

1. Kesepakatan yg menjadi koordinator
2. kesepakatan pembagian tugas & tgg jawab, termasuk hak & kewajiban dalam perjanjian KPBU
3. kesepakatan penggaran dlm penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU
4. Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman
5. Jangka Waktu pelaksanaan KPBU

BADAN USAHA

BUMN/BUMD

PT

BADAN HUKUM ASING

KOPERASI

19 JENIS INFRASTRUKTUR KPBU

 Transportasi	 Jalan	 Sumber daya air dan irigasi	 Air minum	 Sistem pengelolaan air limbah terpusat	 Sistem pengelolaan air limbah Setempat	 Fasilitas Olahraga, Kesenian & Kebudayaan
 Kawasan	 Fasilitas perkotaan	 Konservasi energi	 Minyak dan gas bumi & energi terbarukan	 Ketenagalistrikan	 Telekomunikasi dan infomatika	 Sistem pengelolaan persampahan
 Pemasyarakatan	 Fasilitas Pendidikan	 Pariwisata	 Perumahan Rakyat	 Kesehatan		

SKEMA PROYEK KPBU

1

Skema KPBU dengan
Dukungan Sebagian
Konstruksi

2

Skema KPBU dengan
Penjaminan Pemerintah

3

Skema KPBU dengan
Pengembalian Investasi
Melalui Tarif dan *Viability
Gap Fund (VGF)*

4

Skema KPBU dengan
Pengembalian Investasi
Melalui *Availability
Payment/AP*

SKEMA KPBU 1 DENGAN DUKUNGAN SEBAGIAN KONSTRUKSI

Contoh : Jalan Tol Manado-Bitung

Nilai Investasi	: Rp 5,1 Triliun
Skema Pendanaan	: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan dukungan Pemerintah dalam bentuk konstruksi sebagian
Lokasi	: Sulawesi Utara
Penanggung Jawab Proyek	: Badan Pengatur Jalan <u>Tol</u> (BPJT)
Rencana Mulai Konstruksi	: 2017
Rencana Mulai Operasi	: 2018

Sumber:kppip.go.id

DESKRIPSI PROYEK

Jalan tol sepanjang 39 km ini akan menghubungkan dua kota terbesar di Sulawesi Utara, yakni Manado dan Bitung.

Proyek ini dibagi menjadi dua tahap yakni:

- Seksi 1: Manado – Airmadidi (APBN)
- Seksi 2: Airmadidi – Bitung (PPP)
- Keseluruhan operasi Seksi 1 dan Seksi 2 (PPP-Konsesi)

SIGNIFIKANSI PROYEK

Proyek ini diharapkan mendukung peningkatan lalu lintas pada rute Manado – Bitung, mendukung sektor wisata serta pertumbuhan ekonomi di Manado, Minahasa Utara dan Bitung. Jalan tol ini juga akan menjadi jalan akses utama ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung yang akan dibangun.

SKEMA KPBU 2 DENGAN PENJAMINAN PEMERINTAH

Contoh : Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2X1000 MW Di Jawa Tengah

PENJAMINAN PEMERINTAH

Tujuan

untuk meningkatkan bankabilitas dan kelayakan kredit proyek KPBU

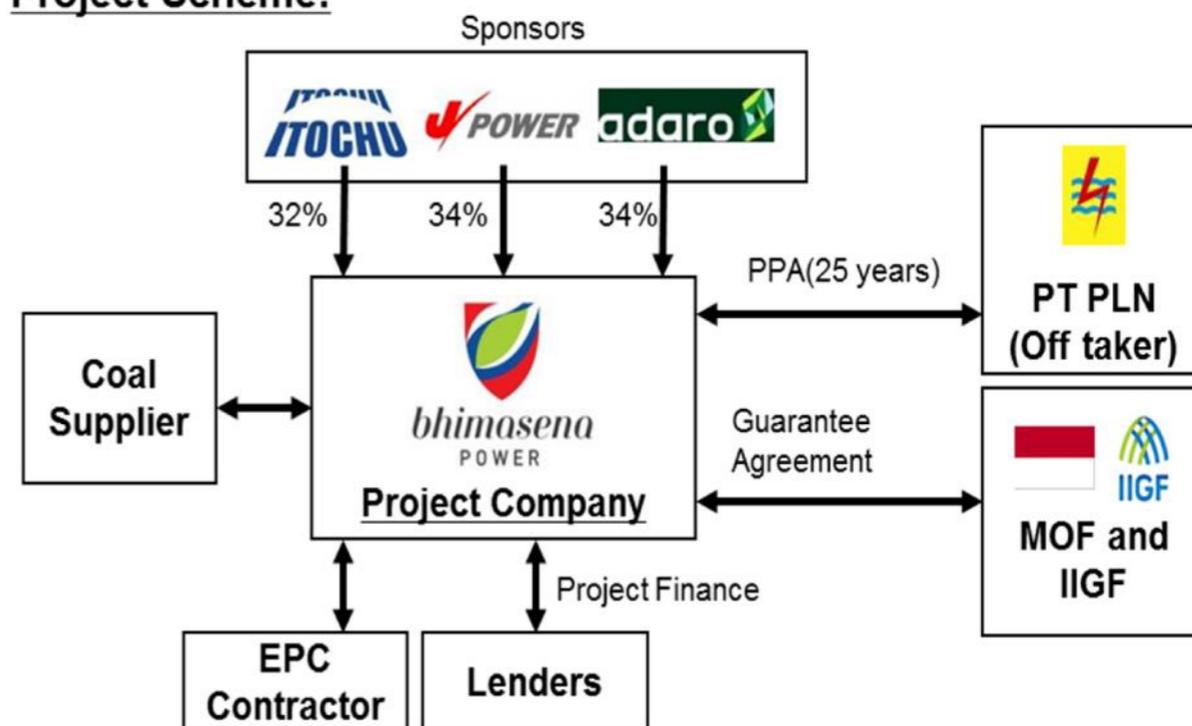
Prinsip:

- Alokasi risiko
- Diberikan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dasar Hukum :

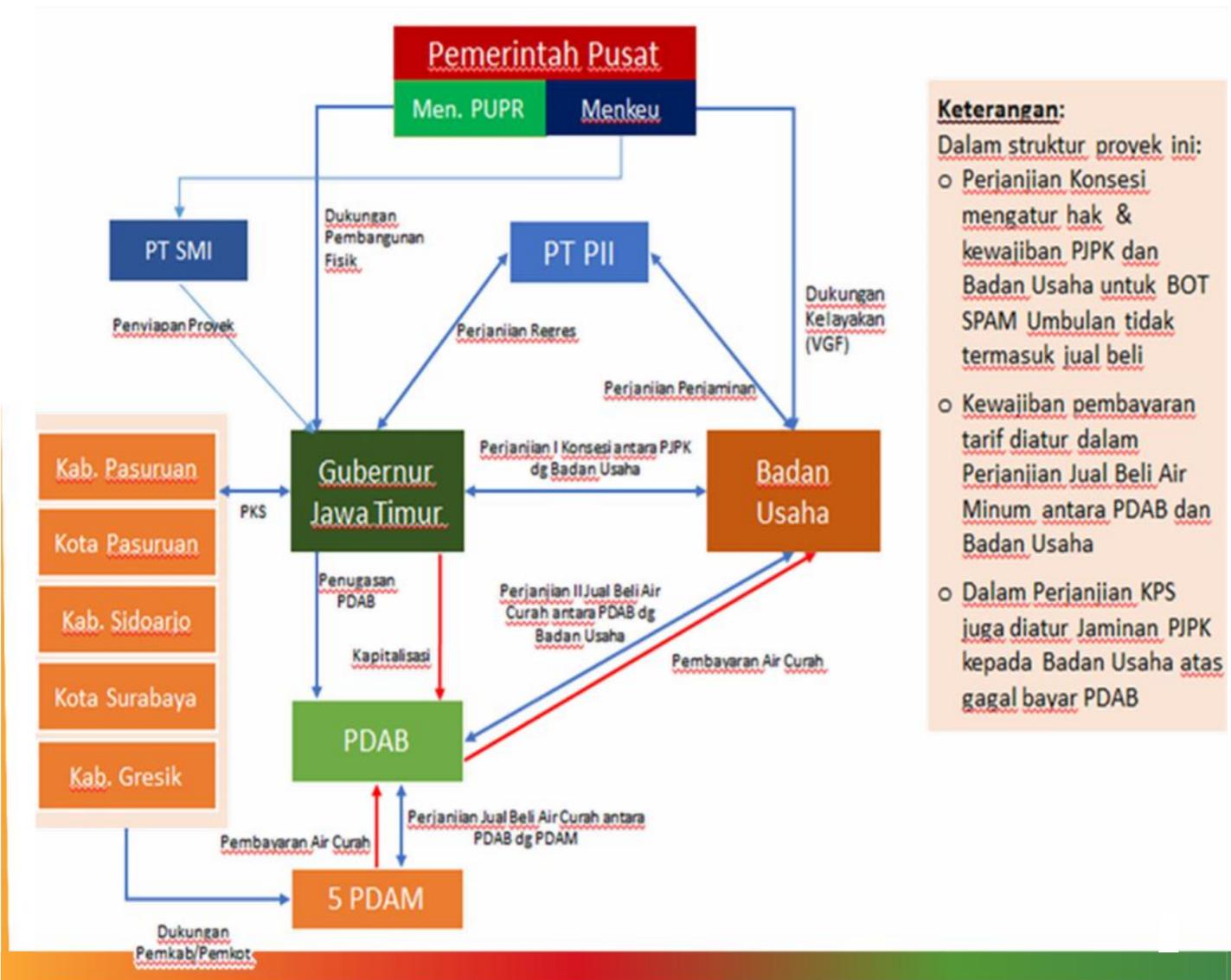
- Perpres No. 78 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur Terhadap Proyek KPBU.
- PMK No. 260 Tahun 2010 Jo. PMK No. 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjaminan Infrastruktur.
- PMK No. 30 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

Project Scheme:



SKEMA KPBU 3 DENGAN PENGEMBALIAN INVESTASI MELALUI TARIF DAN VGF (*Viability Gap Fund*)

Contoh : Proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Umbulan



- **VGF**: fasilitas pemberian dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial.
- VGF **diberikan kepada** proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU dan bertujuan untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek.
- **Maksimal pemberian VGF** sebesar 49% dari nilai investasi proyek
- **Tarif ditetapkan oleh PDAB** berdasarkan perjanjian jualbeli air curah dengan 5 PDAM

Dasar Hukum :

PMK No. 223/PMK.11/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

SKEMA KPBU 4 DENGAN PENGEMBALIAN INVESTASI MELALUI AVAILABILITY PAYMENT/AP

Skema pengembalian investasi melalui:
Availability Payment (AP)

Availability Payment (AP)

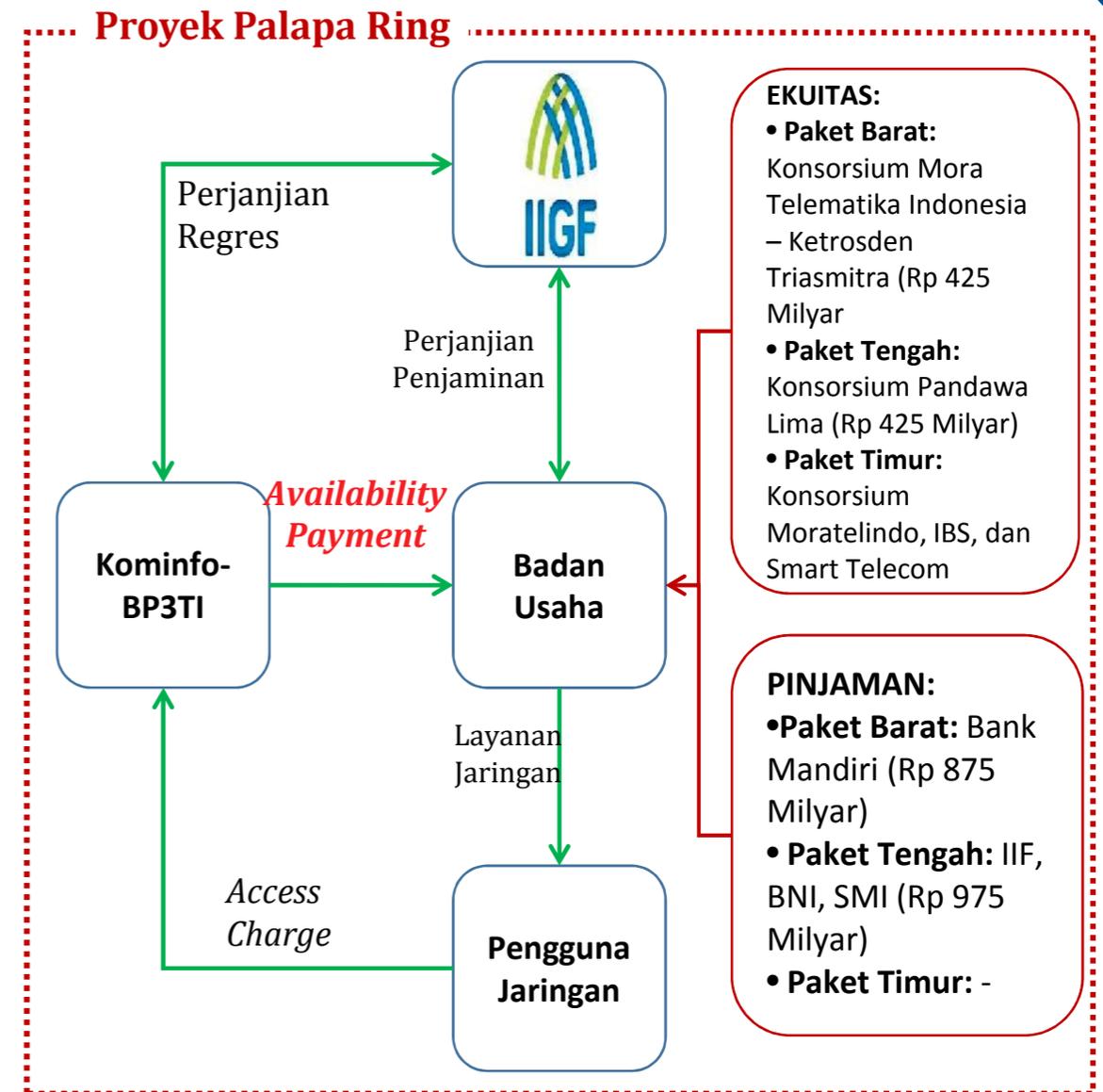
Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU

Dasar Hukum :

- Perpres 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.
- PMK Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.

Kriteria Umum Proyek KPBU AP:

- Proyek infrastruktur yang secara komersial masih marginal
- Proyek infrastruktur ekonomi atau infrastruktur sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat
- Proses pengadaan proyek dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat
- Moda pengembalian investasi kepada badan usaha tidak berasal dari tarif pengguna layanan
- Tarif tetap dapat dikenakan kepada pengguna layanan, dimana pengelolaannya dilaksanakan oleh PJPK



CONTOH: PROYEK DI PROVINSI BANTEN YANG MASUK *PPP BOOK* 2017

“SINDANG HEULA WATER TREATMENT PLANT”



Gambaran Proyek

- Proyek berada di lokasi desa Sindang Heula, Kabupaten Serang
- Proyek terdiri dari 3 bagian yaitu : unit produksi, unit distribusi dan unit service
- Unit produksi terletak 500 meter dari Dam Sindang Heula

Spesifikasi Proyek

Spesifikasi teknis dari proyek ini adalah sebagai berikut:

- Raw water source: ground water
- Rrocessing system: full -equipment
- Distribution water system : piping
- Reservoir volume : 20% of daily use
- Service area's slope : considered flate

Isu

- Kerjasama ini membutuhkan komitmen dari pemerintah untuk menyediakan lahan seluas 13.000 m2
- Diperlukan AMDAL

Struktur Kerjasama

PJK	Gubernur Banten
Peran Swasta	• Pembiayaan, Desain, Bangun, Operasional dan Pemeliharaan aset infrastruktur;
Kontribusi Pemerintah	• Penyediaan Lahan 13.000 m2 • Diperlukan jaminan pemerintah atas risiko politik

Ringkasan Proyek

Estimasi Nilai Proyek	USD 17 juta (utang 70%, ekuitas 30%)
Rencana Masa Konsesi	15-20 Tahun

Jadwal Kegiatan



PEMBIAYAAN INVESTASI NON-ANGGARAN PEMERINTAH (PINA)

PINA

APA ITU PINA

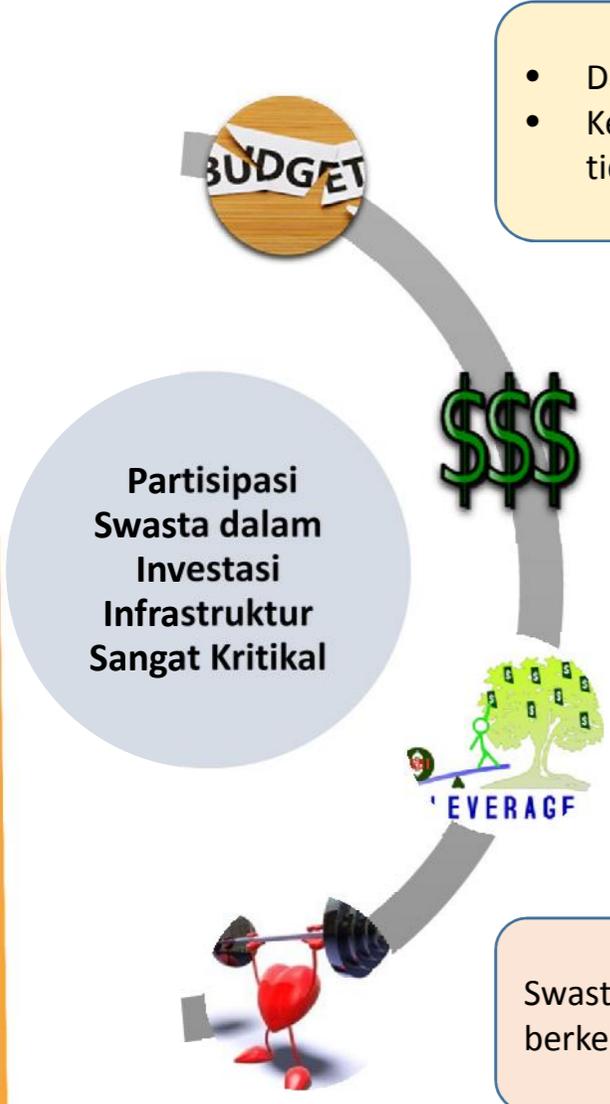
mekanisme pembiayaan proyek investasi prioritas yang dananya bersumber selain dari Anggaran Pemerintah yang didorong dan difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas



TUJUAN PINA

- a. mendukung pencapaian target pembangunan nasional;
- b. memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi dalam negeri;
- c. melakukan konsolidasi dana jangka panjang;
- d. meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional;
- e. menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
- e. mengoptimalkan kontribusi Penerima Modal dan Penanam Modal terhadap proyek-proyek pembangunan Indonesia; dan
- g. meningkatkan kapasitas pembiayaan investasi melalui optimalisasi aset untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

MENDORONG PARTISIPASI SWASTA DALAM INVESTASI INFRASTRUKTUR

- 
- Dana pemerintah terbatas karena adanya **pembatasan lebar defisit anggaran**.
 - Kebutuhan investasi infrastruktur sangatlah besar sehingga anggaran pemerintah difokuskan untuk infrastruktur yang tidak dapat dikelola secara komersial (*filling the gap*).

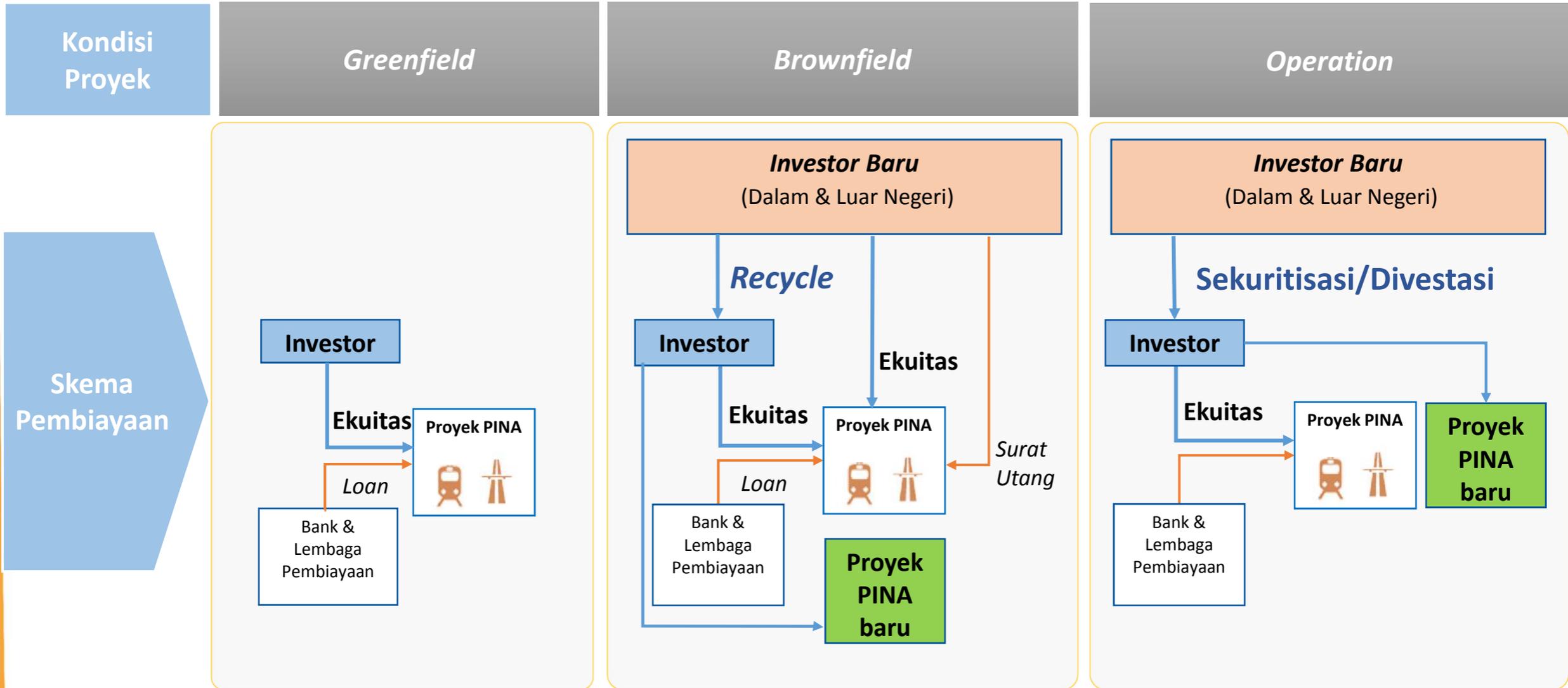
Swasta **berpeluang lebih besar dan fleksibel menarik dana dari luar negeri** (akibat imbal hasil investasi yang rendah) dan **memanfaatkan dana *tax amnesty***.

Korporasi swasta memiliki **kapasitas *leveraging* lebih baik** dibandingkan pemerintah sehingga dengan pendanaan yang sama dapat digunakan untuk melakukan investasi beberapa kali lebih banyak.

Swasta merupakan **sumber dan mitra pembangunan** yang dapat menciptakan **nilai tambah** dan **lapangan pekerjaan** secara berkelanjutan

SKEMA PEMBIAYAAN INVESTASI NON-ANGGARAN PEMERINTAH

Potensi *capital gain* saat *investment recycle* proyek Brownfield



Sumber: Analisa Tim Kementerian PPN/Bappenas

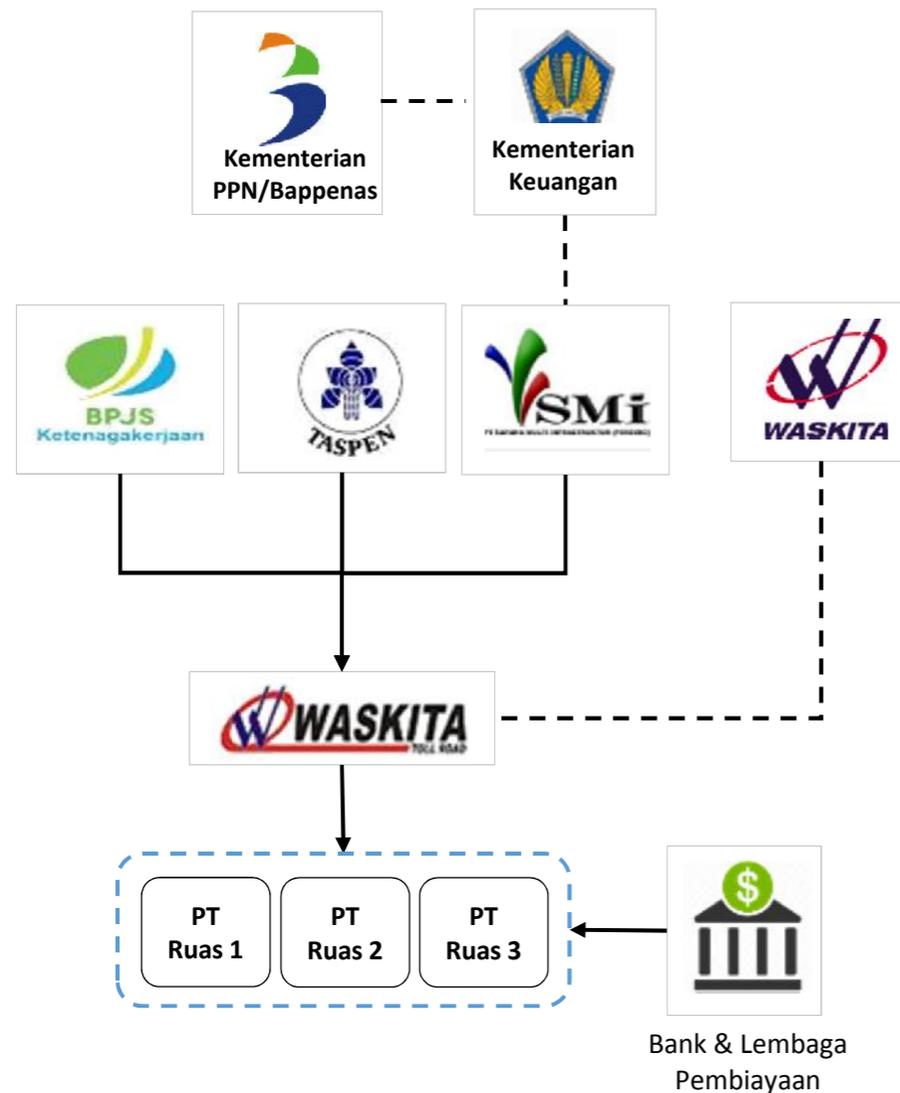
CONTOH PINA: Proyek Tol Trans Jawa (12 Ruas Tol WTR) Financial Close Tahap 1

Sektor: Konektivitas	Sub-Sektor: Jalan Tol
Nama Proyek : Tol Trans Jawa (12 Ruas, 528.7 Km)	
Pelaksana : PT Waskita Toll Road	
Nilai Investasi : Rp. 61.5 Triliun	
Signifikansi: Target Pembangunan (RMJMN 2015-2019) untuk pengembangan Jalan Tol 1000 Km (WTR berperan >52%)	
Situasi & Isu: <ul style="list-style-type: none"> PT Waskita Toll Road baru mampu memenuhi kebutuhan pendanaan ekuitas sebesar Rp. 6 T dari total porsi ekuitas 12.3 T (Gap Rp. 6.3 T) Kemudian diharapkan WTR mendapatkan pinjaman perbankan untuk seluruh proyek senilai ~Rp 61.5 T; 	
Bentuk Fasilitas PINA: <ul style="list-style-type: none"> Pendanaan ekuitas 	
Status: <ul style="list-style-type: none"> <i>Financial closing</i> february untuk pendanaan ekuitas tahap awal terlaksana February 2017 (3.5 T) Dibutuhkan pendanaan stage berikutnya >3T 	



No	Project Name	Project Size	WTR Portion	Total Capex	Equity Portion (30%)
1	Cinere – Serpong (10.1 Km)	2,400,000,000,000	35%	840,000,000,000	252,000,000,000
2	Depok – Antasari (12.1 Km)	3,200,000,000,000	13%	400,000,000,000	120,000,000,000
3	Cimanggis – Cibitung (26.4 Km)	7,900,000,000,000	90%	7,110,000,000,000	2,133,000,000,000
4	Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (11.0 Km)	5,100,000,000,000	60%	3,060,000,000,000	918,000,000,000
5	Ciawi – Sukabumi (54.0 Km)	9,700,000,000,000	100%	9,700,000,000,000	2,910,000,000,000
6	Kanci – Pejagan (35.0 Km)	500,000,000,000	77%	385,000,000,000	115,500,000,000
7	Pejagan – Pemalang (57.5 Km)	6,800,000,000,000	100%	6,800,000,000,000	2,040,000,000,000
8	Pemalang – Batang (39.2 Km)	4,500,000,000,000	60%	2,700,000,000,000	810,000,000,000
9	Batang – Semarang (75.0 Km)	8,300,000,000,000	40%	3,320,000,000,000	996,000,000,000
10	Solo – Ngawi (90.1 Km)	4,900,000,000,000	40%	1,960,000,000,000	588,000,000,000
11	Ngawi – Kertosono (87.0 Km)	4,400,000,000,000	40%	1,760,000,000,000	528,000,000,000
12	Pasuruan – Probolinggo (31.3 Km)	3,800,000,000,000	80%	3,040,000,000,000	912,000,000,000
TOTAL		61,500,000,000,000		41,075,000,000,000	12,322,500,000,000

CONTOH PINA: SKEMA PEMBIAYAAN WASKITA TOLL ROAD



Skema Pembiayaan Tahap Awal WTR

1. WTR akan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan cara menerbitkan saham baru
2. Sehubungan dengan penerbitan saham baru, Waskita Karya akan mengesampingkan haknya untuk membeli saham baru dengan jumlah sesuai dengan bagiannya
3. Para Investor akan mengambil bagian dari saham baru WTR dengan menyetorkan modal
4. WTR akan menggunakan modal tersebut untuk mendanai proyek-proyek jalan tol dengan struktur pendanaan 30% ekuitas dan 70% hutang bank atau lembaga lain untuk setiap ruas

POTENSI SUMBER PENDAPATAN DAERAH LAINNYA



- ❑ **Pinjaman dan Obligasi Daerah*) ;**
- ❑ **Kerjasama Antardaerah;**
- ❑ **Manajemen Aset Daerah, seperti optimalisasi penyewaan gedung / lahan, penjualan aset berjalan yang sudah tidak produktif, dll;**
- ❑ **Alternatif lainnya.**

- ❑ Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- ❑ Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

**) PP No 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah*

Contoh: MANAJEMEN ASET

Manajemen aset publik adalah manajemen *lifecycle* dari aset fisik untuk mencapai *output* yang telah ditetapkan

–The Asset Management Council of Australia

TUJUAN MANAJEMEN ASET*



Mengetahui aset apa yang dimiliki dan kewajibannya (*operating, monitoring, dan/atau maintaining*)



Mengetahui secara rinci lokasi dari aset



Mengetahui kondisi dari aset setiap saat/waktu yang terstandar



Memahami desain kriteria dari aset serta prosedur operasional dan kondisinya



Mengembangkan program perawatan yang memastikan aset siap pakai kapanpun dibutuhkan



Melakukan segala aktivitas untuk mengoptimalkan biaya dari pengoperasian aset dan memperpanjang masa pakai

*) Cagle (2003) dan Davis (2007)

Terima Kasih